

Penanganan Stunting Di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang Dan Kabupaten Garut

Cecep Hasanudin¹, Akadun Akadun², Dadi Mulyadi Nugraha³

¹Sekolah Pasca Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April
email: cecephasanudin87@gmail.com

²Sekolah Pasca Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April
email: duniausaha2005@yahoo.co.id

³Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia
email: dadimulyadi301190@upi.edu

Abstract

The problem of stunting is a very difficult problem to handle, especially in developing countries like Indonesia. According to the Basic Health Research data of the Indonesian Ministry of Health (Riskesdas) in 2018, the prevalence rate of stunting in Indonesia is 8.7 million or 30.7% of infants under five years of age (toddlers), in this case the figure is still above the target set by the Health Agency. World (WHO) by 20%. The problem of stunting is no exception in West Java Province, especially in three districts (Sumedang, Subang, Garut). The method in this research is the method used in writing this article is literature study. Literature study is an activity to gather information relevant to the topic or problem being the object of research. From the results of this study, it can be concluded that the stunting rate is still high due to many factors including poverty, the level of education / knowledge about health, and poor parental lifestyle, such as smoking, drugs, and others. There are various strategies for dealing with stunting in the three districts, but they are basically almost the same, namely the beginning, namely improving coordination of all parties and providing understanding of the importance of preventing stunting early on..

Keywords: Stunting, stunting factor, Human Development Index, Treatment Strategy

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia". Atas dasar tersebut maka negara mempunyai kewajiban melindungi semua kalangan masyarakat tidak terkecuali bayi atau bahkan bayi baru lahir. Pemerintah hendaknya memberikan jaminan di segala bidang karena angka harapan hidup baik bayi maupun ibu melahirkan merupakan salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sehingga jika angka kematian bayi/ ibu melahirkan terus naik maka IPM juga akan terus menurun.

Anak-anak di bawah usia lima tahun sejauh kesejahteraan dan gizi

disebut sebagai seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK) yang merupakan masa penting karena menentukan kehidupan di kemudian hari, oleh karena itu diperlukan pertimbangan preventif untuk mencegah gangguan pada bayi (Priyono, 2020). Permasalahan stunting di negara berkembang seperti Indonesia merupakan permasalahan yang sebetulnya kemiskinan dan tingkat pendapatan sangat mempengaruhi terjadinya stunting.

Stunting adalah suatu kondisi di mana rekor tinggi badan untuk usia di bawah kurang dari dua standar deviasi tergantung pada pedoman WHO (Setiawan et al., 2018). Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, bahwa di Indonesia jumlah



balita mencapai 8,7 juta atau 30,7% dan kondisi ini masih di atas target yang diberikan oleh WHO yaitu 20%, mengharapkan kondisi ini. Kemudian, otoritas publik memberikan pertimbangan khusus yang diingat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dengan tujuan mengurangi tingkat hambatan dan di bawah pedoman yang ditetapkan oleh WHO (Priyono, 2020).

Permasalahan stunting di negara Indonesia apabila tidak serius untuk ditanggulangi maka akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Dari RPJMN yang telah ditetapkan maka perlu ada Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan stunting. Pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penurunan stunting langsung di bawah koordinasi Sekretariat Wakil Presiden, dalam hal ini Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dengan berkeja sama dengan Kementerian /Lembaga terkait (Priyono, 2020). Di Provinsi Jawa Barat presentasi stunting masih cukup tinggi yaitu ada di kisaran 37% dari tingkat nasional terutama yang paling tinggi di Garut yaitu di tahun 2018 berkisar hampir 38%, di Kabupaten Sumedang dan Subang ada di kisaran diatas 30% sehingga peneliti merasa tertarik meneliti tingkat stunting di tiga Kabupaten tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Dalam penulisan artikelnya, penulis

mencari dan mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik atau masalah yang dikaji, dan informasi yang diperoleh berasal dari buku, karya ilmiah, artikel ilmiah, internet dan sumber-sumber yang mendukung penulisan artikel ini, sehingga penulis dapat memanfaatkan berbagai informasi dari studi kepustakaan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi dan mendapatkan solusi yang dibutuhkan (Sugiyono, 2012).

III. TEMUAN PENELITIAN

1. Stunting di Kabupaten Sumedang

Berdasarkan informasi dari laman pemerintah Kabupaten Sumedang terkait kondisi stunting (Sumedangkab.go.id, 2020) menunjukkan bahwa stunting di Kabupaten Sumedang berada di atas rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Barat, menurut data di awal tahun 2018 yaitu 32% dan Jawa Barat 29,9% atau 2,7 juta balita yang terkena stunting, sehingga dapat dimaknai bahwa 100 bayi di Sumedang, kondisinya 32 orang mengalami stunting. Semua komponen harus bahu membahu untuk menyelesaikan permasalahan stunting di Kabupaten Sumedang, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sumedang mengadakan kegiatan Rembug Stunting dan hasilnya mensepakati konsep pentahelix dalam mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Sumedang, yaitu memadukan unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Bupati Sumedang menargetkan tahun 2025 menjadi generasi emas melalui inversasi SDM, dengan melaksanakan aksi konvergensi stunting, yaitu analisa situasi, rencana kegiatan rembug stunting, Perbup



tentang peran desa, kader pembangunan manusia, manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta reuiu kinerja tahunan. Pemerintah Kabupaten Sumedang menargetkan angka stunting dari tahun 2018-2023 bisa turun menjadi 17% yang memfokuskan dari 25 desa di Kabupaten Sumedang ada 10 desa berisiko tinggi yaitu Ciawitali (Buahdua), Suriamedal (Surian), Cibungur, Pangadegan, Sukasirnarasa (Rancakalong), Kadakajaya dan Cijambu (Tanjungsari), serta Tanjungmedar, Tanjungwangi dan Kamal (Tanjungmedar).

2. Stunting di Kabupaten Subang

Pada tahun 2020 Pemkab Subang berupaya untuk mempercepat penurunan hambatan pada tahun 2020, Agus Masykur Rosyadi selaku Wakil Bupati Subang mengadakan meeting secara online beserta kelompok penilai untuk akselerasi peningkatan hambatan pengurangan di wilayah Jawa Barat dari beberapa OPD yang teridentifikasi di wilayah Jawa Barat untuk mengevaluasi pameran komunitas lokal/urban di Jawa Barat dalam melaksanakan majelis, menghambat tindakan balasan. Vicon dilaksanakan di titik fokus sambutan kantor Diskominfo Kabupaten Subang yang juga dihadiri oleh para pionir dan agen dari berbagai OPD diantaranya Dinkes, DP2KBP3A, Dinas PUPR, BP4D, Dinas Ketahanan Pangan, Diskominfo, Disdikbud, Dispemdes, Dinsos dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Subang. Dalam vicon, Wakil Bupati Subang memaparkan mengenai langkah Pemkab Subang untuk mempercepat penghambatan penurunan di tahun 2020, dilanjutkan pertemuan percakapan dengan

kelompok penilai atau kelompok evaluasi. dari Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih satu jam. Kepastian lokasi hambatan di wilayah Subang, kasus infeksi pada balita di atas 8%, pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi, remaja, dan ibu pasca hamil di bawah 100%, akses sterilisasi dan aksesibilitas air minum di bawah. 100% Motivasi di balik penghindaran hambatan di Subang adalah untuk membangun kerja komponen lintas wilayah dan wilayah dalam mempercepat penghambatan penurunan wilayah Subang dan mengantisipasi munculnya hambatan baru. Wakil Bupati Subang sepenuhnya mendorong kegiatan otoritas publik untuk mencapai nol hambatan baru pada tahun 2023 dan Pemkab Subang menargetkan hambatan di bawah 8% pada tahun 2020 menuju Subang Jawa. Fokus Subang pada tahun 2021 untuk hambatan di Subang berada di bawah 5% dan pada tahun 2023 sasarannya adalah nol hambatan baru sebagaimana ditunjukkan oleh sasaran hambatan Jawa Barat. Berbagai langkah dilakukan Pemkab Subang dalam percepatan penghambatan penurunan, mengingat pembenahan KPM 253 kota/kelurahan, papan informasi, penelusuran informasi akibat penimbangan balita dan penyebaran informasi dan data latihan. untuk mempercepat menghambat penurunan. Berbagai serangan dari Tim Penghambat Penurunan Kecepatan (Kamisan Stunting) Kabupaten Subang dilakukan oleh OPD yang diidentikkan dengan individu-individu tim tingkat lokal/penghalang untuk mengakui tenaga kooperatif dalam menjaga dan mempercepat penurunan hambatan di



Kabupaten Subang. seperti linierisasi latihan dari hulu ke hilir (remaja remaja putri ke anak di bawah dua tahun), memperluas sirkulasi data ke Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH melalui perakitan mekanik lokal terkait dan memperluas dukungan belanja di semua perangkat daerah. Ini harus diselesaikan mengingat tingkat warga kurang mampu di Subang masih tinggi, ada 10% KPM PKH yang justru membatasi data (PROKOMPIM Setda Subang, 2020).

3. Stunting di Kabupaten Garut

Kondisi stunting di Kabupaten Garut mendapatkan perhatian khusus, hal ini dapat dilihat dari berita yang dilansir dari laman <https://kandaga.id/> (Sukmana, 2020) yaitu pemerintah Kabupaten Garut memiliki kegiatan dalam rangka mengurangi stunting dengan nama kegiatan Konvergensi Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Garut tahun 2020 yang terintegrasi pada SDGs (Sustainable Development Goals). Pada Rabu (22/7/2020) Wakil Bupati Kabupaten Garut, Bapak Helmi Budiman membuka secara resmi Workshop dengan topik Peran Konvergensi Intervensi Pengurangan Stunting Terpadu di Kabupaten Garut Tahun 2020 yang bertempat di Hotel Harmoni, Jl. Cipanas Baru No.78 Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Ia mengatakan, bergantung pada dampak Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2017, prevalensi hambatan di Kabupaten Garut sebesar 37,8% atau berkurang pada 2018 sebesar 34,7%. Cara mengatasi hambatan di Kabupaten Garut memerlukan pendekatan multisektor, khususnya pendekatan syafaat pangan, kemudian,

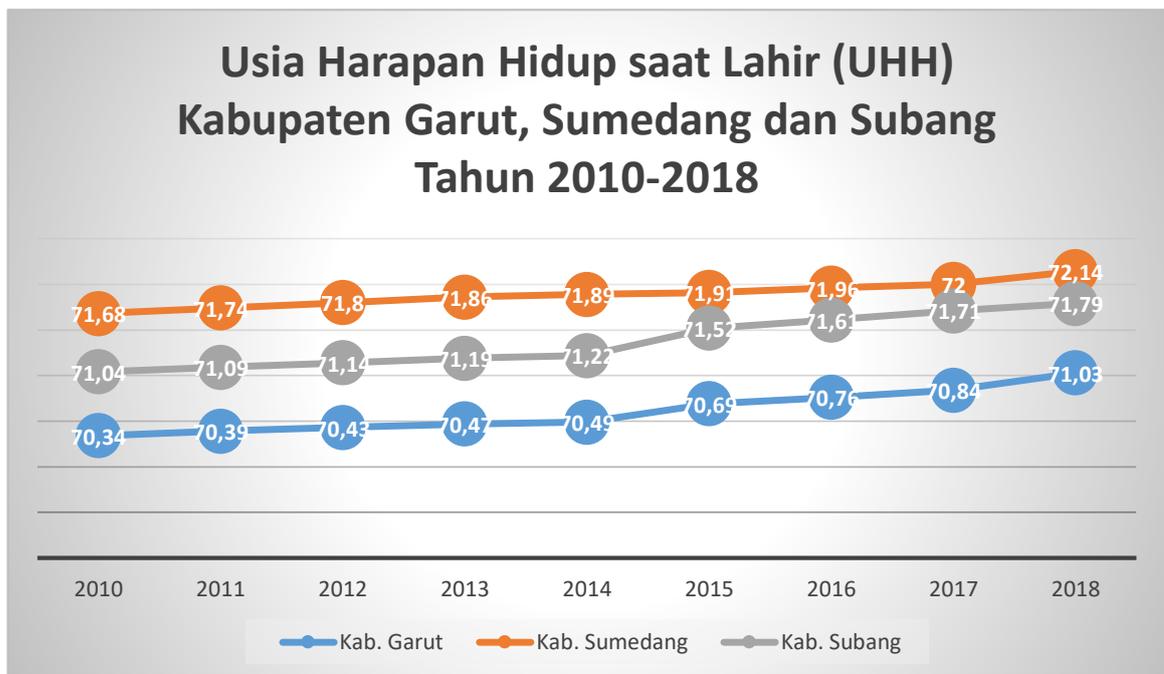
pada saat itu pendekatan mediasi rezeki yang rumit termasuk berbagai kantor/kantor, seperti halnya pendekatan dalam iklim. Kemudian, untuk mengurangi tingkat hambatan di Kabupaten Garut, penting untuk menjadi tuan rumah kolaborasi berbagai pertemuan dalam mengarahkan misi dan instruksi kesejahteraan dan rezeki ke daerah setempat.

Stunting berhubungan dengan angka harapan hidup bayi atau bahkan setelah dewasa, berikut data angka harapan hidup dan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Subang dari tahun 2010-2018 (BPS, 2019a) yaitu:





Stunting berhubungan dengan angka usia harapan hidup saat lahir (UHH), kondisi yang terjadi di kabupaten Garut, Sumedang dan Subang mengenai UHH dapat terlihat dari grafik di bawah ini (BPS, 2019b):



Dari data di atas diperoleh bahwa dari ketiga Kabupaten yang menjadi kajian dalam penelitian ini (Sumedang, Garut dan Subang) sebenarnya dari

tahun ke tahun angka angka harapan hidup dan IPM nya terus meningkat, hal itu merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Stunting jika



tidak diselesaikan akan terus menghambat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena stunting tidak hanya berdampak kepada individunya sendiri, *stunting* akan berpengaruh ke negara. Terganggunya kecerdasan akan membuat daya saing individu *berkurang karena aspek kognitifnya anak akan terganggu*, ke depannya jumlah anak *stunting* yang tidak terkendali akan berdampak ke daya saing negara di tengah persaingan global.

IV. PEMBAHASAN

Stunting dapat didefinisikan sebagai kondisi gizi yang berdasarkan \pada indeks PB/U atau TB/U dimana sesuai standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (*Z-Score*) < -2 SD sampai dengan -3 SD (*pendek / stunted*) dan < -3 SD (*sangat pendek / severely stunted*), kemudian *stunting* dapat dipahami juga sebagai permasalahan kekurangan gizi yang diakibatkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama akibat asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi (Rahmadhita, 2020).

Stunting merupakan permasalahan di setiap negara terutama negara miskin dan negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia yang angkanya masih dianggap tinggi. Permasalahan stunting yang terjadi di negara Indonesia menjadi masalah dunia karena akan menentukan masa depan bangsa, dan permasalahan stunting di negara Indonesia masih tinggi tingkatannya (Priyono, 2020). Di berbagai provinsi di Indonesia angka stunting masih tinggi misalnya di Jawa Barat saat

ini di tahun 2020 mencapai 38 % artinya dari 100 bayi yang lahir 38 orang mengalami stunting (jabarprov.go.id). Angka tersebut dianggap masih cukup tinggi dan berakibat dan menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan karena menghambat dalam pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya stunting mulai dari kurangnya pengetahuan tentang kesehatan terutama masalah gigi anak, kebiasaan orang tua yang negatif dan faktor lain yang dianggap berperan besar dalam timbulnya gejala stunting pada anak dan balita.

Kebiasaan buruk seperti merokok dan minuman keras, jadi miliki status kesehatan yang lebih baik. Tingkat pelatihan juga diidentikkan dengan gaji, di mana tingkat pembayaran akan meningkat secara umum seiring dengan tingkat kenaikan sekolah (Setiawan et al., 2018). Di Indonesia sendiri walaupun sebetulnya tidak mengenal stratifikasi sosial akan tetapi pada kenyataannya status seseorang mempengaruhi tingkat pengetahuan, tingkat ekonomi/ tingkat kesejahteraan dengan kata lain kecenderungan kemiskinan salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan. Tingkat pelatihan juga mempengaruhi tingkat informasi, sehingga tingkat informasi yang layak membantu dalam memilih makanan dengan baik dan sesuai, seperti halnya merawat kondisi medis dengan tepat (Setiawan et al., 2018).

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah terutama sebagai pengambil kebijakan tidak terkecuali oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, Subang dan



Garut. Misalnya upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang diantaranya dengan adanya Program Rembug Stunting diantaranya program pokoknya adalah:

- a. Peningkatan koordinasi antar pemerintah dan lembaga/ masyarakat.
- b. Ada program prioritas pengentasan angka stunting yaitu di 10 desa yang ada di Kabupaten Sumedang
- c. Menyusun program anggaran yang berkaitan dengan program penanggulangan stunting

Sehingga dengan adanya program tersebut diharapkan Kabupaten Sumedang di Tahun 2023 angka stunting menurun hingga ke angka kurang dari 17 % untuk menuju generasi emas di tahun 2023. Pada dasarnya program kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang telah dijalankan dengan sepenuhnya terutama mengenai program prioritas 10 desa yang menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai upaya yang sebagian sudah agenda rutin di pemerintahan sebelumnya.

Adapun strategi yang dirancang dan dilaksanakan oleh Kabupaten Subang untuk menangani angka stunting sangat istimewa sekali karena targetnya yang sangat tinggi yaitu Pemerintah Kabupaten Subang mencanangkan di tahun 2023 'Subang Zero Stunting' atau ditargetkan Subang di Tahun 2023 sudah tidak ada lagi balita/ anak yang mengalami stunting (subang.kab.go.id). walaupun sebetulnya untuk mencapai program tersebut sangat sulit tapi ada berbagai upaya diantaranya Program Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di

253 desa/ kelurahan, manajemen data yang diperlukan melalui analisa/ hasil penimbangan balita tiap bulan dan wajib dilaporkan, publikasi data/ informasi stunting. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sumedang terus meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah ini serta meningkatkan peran serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (PROKOMPIM Setda Subang, 2020)

Sementara di Kabupaten Garut yang notabene menjadi Kabupaten dengan tingkat stunting yang paling tinggi di Jawa Barat yaitu sebesar 37,8 % tidak kalah memberikan berbagai solusi mengenai penanganan stunting diantaranya:

- a. adanya program SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan program peningkatan peran serta OPD dalam menangani masalah stunting;
- b. mengadakan workshop kepada lapisan masyarakat misalnya ibu hamil, kader posyandu, tenaga kesehatan, dan lain-lain;
- c. mengadakan pendekatan multi sektoral kepada semua lapisan masyarakat;
- d. mengadakan pendekatan lingkungan;
- e. kampanye edukasi gizi/ Kesehatan;
- f. pendekatan intervensi gizi spesifik; dan
- g. pendekatan intervensi gizi sensitif melalui dinas terkait.



Dengan berbagai program tersebut diharapkan angka stunting di Kabupaten Garut terus menurun bahkan menyentuh angka nol, walaupun pada dasarnya sangat berat sekali tetapi dengan berbagai upaya tersebut diharapkan cepat terealisasi.

V. PENUTUP

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kasus stunting di Provinsi Jawa Barat masih sangat tinggi yaitu 27% dari angka nasional, sedangkan untuk kasus tertinggi di Jawa Barat ada di Kabupaten Garut yang menjadi salah satu locus penelitian ini sebesar 37,8 % dari total kasus di Jawa Barat. Sedangkan berbagai upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah masing-masing sangat beragam diantaranya di Kabupaten Sumedang ada program Rembug Stunting, di Kabupaten Subang Pemerintah menetapkan berbagai macam program yang pada intinya adalah meningkatkan peran serta semua lapisan melalui peningkatan peran Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di 253 desa yang ada di Kabupaten Subang serta mengedepankan pengoptimalan data-data/ laporan bulanan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan. Terakhir di Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Garut memberikan solusi yaitu diantaranya peningkatan peran serta pemerintah dan semua kalangan, sebagai macam pendekatan kepada masyarakat serta melakukan kampanye edukasi gizi dan kesehatan. Dari berbagai macam upaya tersebut pada dasarnya tujuannya sama yaitu penanganan dan percepatan masalah stunting dengan

secepatnya karena masalah ini bisa menghambat terutama pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tiga kabupaten tersebut.

REFERENSI

- BPS. (2019a). *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten Kota di Jawa Barat, 2010-2018*. Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
<https://jabar.bps.go.id/statictable/2019/04/21/586/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-2010-2018.html>
- BPS. (2019b). *Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2010-2018*. Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
<https://jabar.bps.go.id/statictable/2019/04/21/587/usia-harapan-hidup-saat-lahir-uhh-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-2010-2018.html>
- Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 149–174.
<https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>
- PROKOMPIIM Setda Subang. (2020). *Upaya Kabupaten Subang Dalam Percepatan Penurunan Stunting 2020*. <https://jabarprov.go.id/>
https://jabarprov.go.id/index.php/news/39741/Upaya_Kabupaten_Subang_Dalam_Percepatan_Penurunan_Stunting_2020_
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan



Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229.

<https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>

Setiawan, E., Machmud, R., & Masrul, M. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(2), 275. <https://doi.org/10.25077/jka.v7.i2.p275-284.2018>

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.

Sukmana, J. (2020). *Wabup Garut Buka Workshop Peranan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020*. Kandaga.Id. <https://kandaga.id/wabup-garut-buka-workshop-peranan-konvergensi-intervensi-penurunan-stunting-terintegrasi-tahun-2020/>

Sumedangkab.go.id. (2020). *Angka Stunting di Sumedang Masih Tinggi, Pemkab Gelar Rembug Stunting*. <https://Sumedangkab.Go.Id/>. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/angka-stunting-di-sumedang-masih-tinggi-pemkab-gelar-rembug-stunting>

